

**RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)**

**KABUPATEN SUKABUMI**

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Dalam Kepemerintahan yang baik, Instansi Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan Rencana Strategis yang akan diselenggarakan tahun berjalan serta tahun yang akan datang. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun Rencana Kerja Strategis sebagai media pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2016-2021 berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terutama dalam mendorong kinerja dan keberdayaan sumber daya aparatur dalam melakukan tata kelola kepemerintahan yang baik, dengan tetap konsisten untuk menerima umpan balik demi perbaikan dan peningkatan kinerja.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menyusun Rencana Strategis ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Palabuhanratu, 30 Desember 2016 Kepala Dinas,



**ADE SETIAWAN,S.IP**

Pembina Tk. I

NIP. 19630603 198503 1 021

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………. i DAFTAR ISI …………………………………………………………….. ii

[DAFTAR TABEL ………………………………………………………… iv](#_TOC_250001)

[DAFTAR GAMBAR …………………………………………………….. v](#_TOC_250000)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN …………………………………………….** | **I-1** |
| 1.1 | Latar Belakang…………………………………………………. | I-1 |
| 1.2 | Landasan Hukum………………………………………………. | I-2 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan…………………………………………….  1.3.1 Maksud …………………………………………………. | I-7  I-7 |
| 1.4 | 1.3.2 Tujuan…………………………………………………… Sistematika ………………………………………................... | I-7  I-8 |
| **BAB II** | **GAMBARAN PELAYANAN BPMPD ……………………….** | **II-1** |
| 2.1 | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ……………………. | II-1 |
| 2.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………………   * + 1. Sumber Daya Aparatur ……………………………….     2. Sarana Prasarana Penunjang ….…………………… | II-5 II-5  II-6 |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ………………………. | II-8 |
| 2.4 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan  Perangkat Daerah ……………………………………………. | II-11 |

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN**

**FUNGSI ……………………………………………………… III-1**

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi …………………………………………………………. III-1

* 1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ………………………………………. III-3
  2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BPMPD Provinsi

Jawa Barat …………………………………………………….. III-4

* 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkup Strategis ……………………………………………… III-8

* 1. Penentuan Isu-Isu Strategis …………………………………. III-12

# BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ……. IV-1

* 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah …………………………………………………………. IV-1

* 1. Strategi dan Kebijakan ……………………………………….. IV-7

# BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

**INDIKATIF …………………………………………………….. V-1**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ………………. VI-1**

**BAB VII PENUTUP …………………………………………………….. VII-1**

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Pegawai BPMPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016. Tabel 2.2 Kondisi Sarana Prasarana BPMPD Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016.

Tabel2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPMPD Kabupaten Sukabumi 2011 – 2015.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPMPD Kabupaten Sukabumi 2011 – 2015.

Tabel 3.1 Telaahan Renstra BPMPD Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPD Kabupaten Sukabumi 2016-2021.

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan BPMPD Kabupaten Sukabumi.

Tabel 5.1 Daftar Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan BPMPD Kabupaten Sukabumi 2016-2021.

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPMPD Kabupaten Sukabumi.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja BPMPD yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sukabumi. Gambar 3.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi.

Gambar 3.3 Peta Tipologi Desa berdasarkan IDM Kabupaten Sukabumi.

# BAB I PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016 - 2021 merupakan Renstra untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2016 - 2021 yang memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra mengandung Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran) yang berfungsi menjabarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016 - 2021. Penyusunan Renstra telah dilaksanakan secara partisipasif dengan melibatkan unsur Pimpinan, Pejabat kunci dan Staf yang mampu memberikan masukan serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penyusunan Renstra telah memperhatikan RPJMD Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian, Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016 - 2021 telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016 - 2021.

Naskah Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan, terhitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi ini disusun sebagai penjabaran Visi dan Misi

pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2016-2021. Dokumen ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi, berdasarkan tujuan dan sasaran yang disepakati bersama sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa rencana program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMD Kabupaten Sukabumi.

# Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 No 20 Seri D);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
5. Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 58).
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

# Maksud dan Tujuan

* + 1. **Maksud**

Penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016- 2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada DPMD Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi.

# Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan DPMD Kabupaten Sukabumi;
2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja DPMD;
3. Penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan DPMD Kabupaten Sukabumi.

# Sistematika

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

# BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

# BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD

* 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

# BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
  4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  5. Penentuan Isu-isu Strategis

# BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

* 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
  2. Strategi dan Kebijakan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BAB V RENCANA** | **PROGRAM** | **DAN KEGIATAN,** | **INDIKATOR** |
| **KINERJA,**  **INDIKATIF** | **KELOMPOK** | **SASARAN, DAN** | **PENDANAAN** |

# BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

**BAB VII PENUTUP**

## DPMD Kabupaten Sukabumi

**BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)**

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

DPMD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi. DPMD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPMD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsi DPMD yaitu :

1. Perumusan kebijakanan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangan dan Aset Desa; Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan prasarana Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; Administrasi Pemerintahan Desa; Keuangan dan Aset Desa; pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan Pemberdayaan Masyarakat;

## DPMD Kabupaten Sukabumi

1. Penyelenggaraan penataan Desa;
2. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar Desa;
3. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
4. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah;
5. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat desa;
6. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
7. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
8. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016, sebagai berikut :

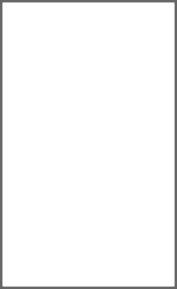
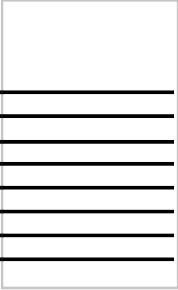
* 1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat, membawahkan:
     1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
     2. Sub Bagian Keuangan
     3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
  3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan
     1. Seksi Administrasi Desa
     2. Seksi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
     3. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa
  4. Bidang Keuangan dan Aset Desa membawahkan :
     1. Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa
     2. Seksi Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa
     3. Monitoring Evaluasi Keuangan dan Aset Desa

## DPMD Kabupaten Sukabumi

* 1. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, membawahkan :
     1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
     2. Seksi Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar
     3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Masyarakat
  2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
     1. Seksi Kelembagaan Masyarakat
     2. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
     3. Seksi Kawasan Pedesaan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional



# PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR : 58 TAHUN 2016



**STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS**

## DPMD Kabupaten Sukabumi

**SEKRETARIS**

**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA**

**KASUBBAG KEUANGAN**

**KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**KASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET DESA**

**KASI PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET DESA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | |
|  | |  |
|  | **KASI PENATAAN ADMINISTRASI DESA** | |
|  |
|  | | |
|  | **KASI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA** | |
|  |
|  | | |
|  | **KASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA** | |
|  |

## Rencana Strategis DPMD Tahun 2016-2021

**KASI MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DAN ASET DESA**

**KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA**

**KASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA**

**KASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SOSIAL DASAR**

**KASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MASYARAKAT**

**.**

**II-10**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD )**

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  | | |
|  | **KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT** | |
|  |
|  | | |
|  | **KASI PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA** | |
|  |
|  | | |
|  | **KASI KAWASAN PERDESAAN** | |
|  |

## DPMD Kabupaten Sukabumi

* 1. **Sumber Daya Perangkat Daerah**
     1. **Sumber Daya Aparatur**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMD pada saat ini didukung pegawai sebanyak 46 orang, terdiri dari 35 PNS dan 11 TKS dengan rincian sebagai berikut :

# Tabel 2.1

**Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016/2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Laki-**  **Laki** | **Perempuan** | **Total** |
| 1 | **Jumlah Pegawai** | | | |
| - PNS | 27 | 8 | 35 |
| - CPNS | - | - | - |
| - TKS | 10 | 1 | 11 |
| **Jumlah** | **37** | **9** | **46** |
| 2 | **Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:** | | | |
| a. Golongan IV | 4 | 1 | 5 |
| b. Golongan III | 17 | 6 | 23 |
| c. Golongan II | 6 | 1 | 7 |
| d. Golongan I | - | - | - |
| **Jumlah** | **25** | **8** | **33** |
| 3 | **Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :** | | | |
| a. Kepala Dinas | 1 | - | 1 |
| b. Sekretaris | 1 | - | 1 |
| c. Kepala Bidang | 3 | 1 | 4 |
| d. Kepala Sub. Bagian | 1 | 3 | 4 |
| e. Kepala Seksi | 11 | 1 | 12 |
| f. Fungsional Umum | 11 | 3 | 14 |
| **Jumlah** | **28** | **8** | **36** |

## DPMD Kabupaten Sukabumi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | **Jumlah pegawai yang telah**  **mengikuti Pendidikan Penjejangan Terakhir :** |  |  |  |
| a. Diklatpim II | 1 | - | 1 |
| b. Diklatpim III | 4 | 1 | 5 |
| c. Diklatpim IV/Adum | 7 | 4 | 11 |
| **Jumlah** | **12** | **5** | **17** |
| 5 | **Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :** | | | |
| a. Strata 2 (Magister) | 8 | 2 | 10 |
| b. Strata 1 (Sarjana) | 12 | 3 | 15 |
| c. Diploma | - | - | - |
| d. SLTA | 7 | 3 | 10 |
| e. SLTP | - | - | - |
| f. SD | - | - | - |
| **Jumlah** | **27** | **8** | **35** |

Sumber : Subag. Kepegawaian dan Umum

# Sarana Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki DPMD Kabupaten Sukabumi, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut :

# Tabel 2.2

**Kondisi Sarana Prasarana DPMD KabupatenSukabumi Tahun 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sarana Prasarana | Banyak (Unit) | Kondisi | |
| Baik | Rusak/  Kurang Baik |
| 1 | Gedung/Kantor | 1 | 1 | - |
| 2 | Kendaraan Roda 4 | 7 | 7 | - |
| 3 | Kendaraan roda 2 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | Mesin Ketik | 15 | 15 | - |
| 5 | Mesin Fotocopy | 2 | 2 | - |
| 6 | Rak Besi/Metal | 1 | 1 | - |
| 7 | Filling Besi/Metal | 16 | 16 | - |

## DPMD Kabupaten Sukabumi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Lemari Kayu | 8 | 8 | - |
| 9 | Alat Penghancur Kertas | 12 | 12 | - |
| 10 | Papan Pengumuman | 1 | 1 | - |
| 11 | White Board | 5 | 5 | - |
| 12 | Overhead Projektor | 5 | 5 | - |
| 13 | Zice | 1 | 1 | - |
| 14 | Meja Rapat | 3 | 3 | - |
| 15 | Meja Tulis | 41 | 41 | - |
| 16 | Kursi Tamu | 11 | 11 | - |
| 17 | Kursi Putar | 4 | 4 | - |
| 18 | Kursi Lipat | 57 | 57 | - |
| 19 | Meja Komputer | 4 | 4 | - |
| 20 | Meja Biro | 7 | 7 | - |
| 21 | Sofa | 1 | 1 | - |
| 22 | Jam Dinding | 13 | 13 | - |
| 23 | Mesin Penghisap Debu | 1 | 1 | - |
| 24 | Mesin Potong Rumput | 1 | 1 | - |
| 25 | Air Conditioner | 22 | 22 | - |
| 26 | Alat Rumah Tangga Lainnya | 62 | 62 | - |
| 27 | Alat Pemadam Kebakaran | 1 | 1 | - |
| 28 | Komputer PC | 8 | 8 | - |
| 29 | Laptop | 10 | 10 | - |
| 30 | Note Book | 33 | 33 | - |
| 31 | Printer | 11 | 11 | - |
| 32 | Server | 1 | 1 | - |
| 33 | Meja dan Kursi Kerja | 142 | 142 | - |
| 34 | Alat Studio | 28 | 28 | - |
| 35 | Alat Komunikasi | 12 | 12 | - |

Sumber : Subag. Kepegawaian dan Umum (Pengelola barang)

## DPMD Kabupaten Sukabumi

* 1. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja pelayanan DPMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana dan Program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan tugas di Bidang Kesekretariatan, Bidang Pemerintahan Desa, Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, Bina Kesewadayaan dan Kelembagaan Masyarakat dan Bina Pengembangan Desa;
4. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Kearsipan;
5. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Unit Kerja lain;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Tugas;
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa semua target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2011

– 2015, sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 yaitu sebagai berikut :

## DPMD Kabupaten Sukabumi

**Tabel 2.3**

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target Akhir Renstra** | **Realisasi Capaian KInerja** | | | | | **Capaian Target Akhir Renstra** | **Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. | Jumlah Desa yang  mendapatkan Alokasi Dana Desa | 381 | 363 | 363 | 381 | 381 | 381 | 381 | 100% |
| 2. | Jumlah Lembaga Masyarakat Desa | 381 | 363 | 363 | 381 | 381 | 381 | 381 | 100% |
| 3. | Jumlah Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan | 390 | 84 | 84 | 83 | 172 | 102 | 525 | 135% |
| 4. | Jumlah Kelompok Binaan LPM | 14 |  |  |  | 7 | 10 | 17 | 121% |
| 5. | Pembangunan Pasar Desa | 57 | 7 | 17 | 5 | 3 | 7 | 39 | 68% |

*Sumber : Subag Perencanaan dan Program*

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (**Tabel 2.3**), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN. Anggaran Belanja Daerah DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2011-2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2011-2015, sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2.4** berikut :

## DPMD Kabupaten Sukabumi

**Tabel 2.4**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada DPMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 s.d 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi &  Anggaran Pada Tahun | | | | |
| 2011  (000) | 2012  (000) | 2013  (000) | 2014  (000) | 2015  (000) | 2011  (000) | 2012  (000) | 2013  (000) | 2014  (000) | 2015  (000) | 2011  (%) | 2012  (%) | 2013  % | 2014  (%) | 2015  (%) |
| **BELANJA**  **DAERAH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Belanja tidak  langsung | 2.097.8  79 | 2.482.2  11 | 2.382.8  97 | 2.179.9  46 | 2.443.5  96 | 2.033.  533 | 2.202.7  08 | 2.311.0  06 | 2.137.4  93 | 2.326.9  35 | 96,9  3 | 88,74 | 96,9  8 | 98,05 | 95,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Belanja  langsung | 4.461.8  14 | 8.447.5  38 | 8.574.2  68 | 11.033.  982 | 10.288.  482 | 4.157.  541 | 8.277.2  94 | 8.490.8  68 | 10.948.  381 | 10.155.  087 | 93,1  8 | 97,98 | 99,0  3 | 99,22 | 98,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **6.559.6**  **93** | **10.929.**  **749** | **10.957.**  **164** | **13.213.**  **927** | **12.732.**  **077** | **6.191.**  **074** | **10.480.**  **002** | **10.801.**  **874** | **13.085.**  **874** | **12.482.**  **022** | **94,3**  **8** | **95,89** | **98,5**  **8** | **99,03** | **98,04** |

Sumber : Subbag Keuangan DPMD Kabupaten Sukabumi

## DPMD Kabupaten Sukabumi

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

DPMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPMD Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan Ancaman *Threaths* (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

# Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada Lingkungan Internal, terdapat Faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas DPMD untuk mengubah atau mempengaruhinya.

# Unsur Kekuatan, antar lain terdiri dari :

* + 1. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
    2. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
    3. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
    4. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
    5. Tersedianya anggaran

## DPMD Kabupaten Sukabumi

* 1. **Unsur Kelemahan, antara lain terdiri dari :**
     1. Terlalu berorientasi pada anggaran;
     2. Belum tersedianya sistem informasi data;
     3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
     4. Kurangnya tenaga fungsional

# Analisis Lingkungan Eksternal

Sama dengan analisis lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni faktor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengeruhinya. Atau paling tidak, kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman lebih terbatas.

# Faktor Peluang, antara lain terdiri dari :

* + 1. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
    2. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
    3. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
    4. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
    5. Adanya program-program bantuan dari provinsi dan pusat;
    6. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## DPMD Kabupaten Sukabumi

* 1. **Faktor Ancaman, antara lain terdiri dari :**
     1. Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
     2. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
     3. Besarnya jumlah keluarga miskin;
     4. Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
     5. Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai;
     6. Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah.

# BAB III

**ISU-ISU STRATEGIS** **BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi fungsinya yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan, bina pemerintahan desa, bina pemberdayaan usaha ekonomi desa, bina keswadayaan dan kelembagaan masyarakat, dan bina pengembangan desa;
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. **Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; belum tertibnya manajemen dan tata kelola administrasi desa; Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang belum memadai; Penguasaan Manajemen Teknologi Informasi yang masih rendah; belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan desa; Penggalian dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa masih rendah; belum optimalnya pelayanan Pemerintahan Desa.
2. **Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia; kurangnya sarana dan prasarana kelembagaan; kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan; masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha; belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan; belum optimalnya promosi dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); Lemahnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam melestarikan hasil kegiatan.
3. **Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh menurunnya kesadaran masyarakat terhadap swadaya dan gotong royong, kurang berdayanya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan; kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa; proses perencanaan pembangunan partisipatif yang belum optimal.
4. **Masih adanya Desa yang termasuk kategori Desa tertinggal**, diantaranya dikarenakan oleh belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa; kurangnya kajian terhadap status perkembangan desa; penggalian potensi sumber daya desa yang masih rendah; belum terencananya program pembangunan di desa secara baik; masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program

pembangunan dari pemerintah; belum bersinerginya perencanaan pembangunan di Desa; masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa; masih tingginya angka kemiskinan.

1. **Belum Optimalnya Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh bangunan Kantor yang belum representatif; kurangnya sarana dan prasarana kantor; kurangnya Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil; masih kurangnya kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai; Masih rendahnya Pagu Anggaran untuk membiaya tugas dan fungsi; masih perlunya sinergitas program/kegiatan antar bidang.

# Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, bahwa capaian Pembangunan yang telah diraih pada Periode sebelumnya dan tantangan Pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2016-2021 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah : “***Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.***

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada 4 (empat) MISI Utama yang akan dijalankan, yaitu :

## Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Lokal melalui Sektor Agribisnis, Pariwisata dan Industri Berwawasan Lingkungan.

1. ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi dan religius*.**
2. ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional*.**
3. ***Optimalisasi Pelayanan Publik khususnya bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastuktur*.**

Adapun tupoksi DPMD untuk mendukung pelaksanaan Visi dan Misi tersebut yaitu melalui 3 Strategi Kebijakan dan 4 program yang diamanatkan oleh RPJMD 2016-2021 yaitu :

# Strategi Kebijakan :

* 1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
  2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Lembaga Keuangan Mikro.
  3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan.

# Program :

* + 1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
    2. Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan
    3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
    4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

# Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DPMD Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), berdasarkan Renstra Kemendagri RI bahwa Ditjen PMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat melaksanakan program :

1. Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP); serta
8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional Dalam rangka pelaksanaan program program tersebut DPMD

Kabupaten Sukabumi senantiasa melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pengajuan program dan kegiatan berupa pelaksanaan program dan anggaran Urusan Bersama, Tugas Pembantuan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berasal dari DIPA Ditjen PMD Kemendagri RI dan Kementerian Desa dan PDT.

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat 2013-2018 diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Jangka Menengah**  **Renstra K/L** | **Permasalahan Pelayanan OPD**  **Provinsi** | **Sebagai Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat | Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang bidang tertentu. | DPMD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan misi 5 bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan peran pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan  pembangunan perdesaan |
| 2 | Meningkatnya  Kapasitas Kelembagaan | Meningkatnya  jumlah pengangguran | Kurangnya data  base perkembangan | DPMD Provinsi Jawa  Barat merupakan OPD yang |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masyarakat |  | desa sebagai | melaksanakan |
|  | bahan | urusan wajib |
|  | perencanaan. | pemberdayaan |
|  |  | masyarakat dan |
|  |  | desa, menerapkan |
|  |  | pola pemberdayaan |
|  |  | masyarakat dan |
|  |  | pemerintahan desa |
|  |  | yang spesifik, holistik |
|  |  | dan komprehensif, |
|  |  | dalam rangka |
|  |  | mewujudkan |
|  |  | masyarakat berdaya, |
|  |  | bersinergi dan |
|  |  | mencapai hasil yang |
|  |  | optimal. |
| 3 | Pemantapan | Migrasi penduduk | Belum optimalnya | Program |
|  | Program Nasional | desa ke | prasarana | pemberdayaan |
|  | Pemberdayaan | perkotaan | pendukung untuk | masyarakat dan desa |
|  | Masyarakat |  | melaksanakan | secara kelembagaan |
|  | Mandiri Perdesaan |  | seluruh | ditangani dari pusat |
|  | (PNPM-MP) |  | pelaksanaan | oleh Direktorat |
|  |  |  | tupoksi secara | Perkotaan dan |
|  |  |  | computerise | Perdesaan |
|  |  |  |  | BAPPENAS, |
|  |  |  |  | Direktorat Jenderal |
|  |  |  |  | Pemberdayaan |
|  |  |  |  | Masyarakat dan |
|  |  |  |  | Desa sampai daerah |
|  |  |  |  | yakni Provinsi |
|  |  |  |  | maupun kabupaten |
|  |  |  |  | kota, yang bersinergi |
|  |  |  |  | dan berorientasi |
|  |  |  |  | secara berjenjang |
| 4 | Meningkatnya | Kecenderungan | Memudarnya rasa | Adanya dukungan |
|  | Pengembangan | menurunnya | kebersamaan, | sumber dana untuk |
|  | Pemberdayaan | budaya gotong | kekeluargaan, dan | menjalankan Visi, |
|  | Adat dan Sosial | royong pada | persaudaraan | Misi dan Tupoksi |
|  | Budaya | masyarakat desa | sebagai bangsa | DPMD |
|  | Masyarakat | dan perkotaan | Indonesia yang |  |
|  |  | yang diindikasikan | dicirikan dari : (a) |  |
|  |  | oleh rendahnya | menurunnya |  |
|  |  | tingkat partisipasi | integrasi sosial |  |
|  |  | dan keswadayaan | masyarakat, (b) |  |
|  |  | masyarakat dalam | menurunnya |  |
|  |  | pembangunan | semangat dan jiwa |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan asas kebersamaan dan keanekaragaman,  (c) menurunnya peran lembaga- lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, (d) menurunnya partisipasi masyarakat dalam  pembangunan. |  |
| 5 | Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa | Belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa dan  Kelurahan | Kesinambungan program yang masih fluktuatif setiap tahun. | Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan  tupoksi dengan baik |
| 6 | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan TTG | Lemahnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa  dan Kelurahan | Program kegiatan berlokasi desa belum bersinergi antar OPD di Jawa Barat. |  |
|  |  | Lemahnya pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan  perencanaan |  |  |
|  |  | Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relatif masih  rendah |  |  |
|  |  | Belum seluruhnya  Sekretaris Desa menjadi PNS |  |  |

# Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Strategis.

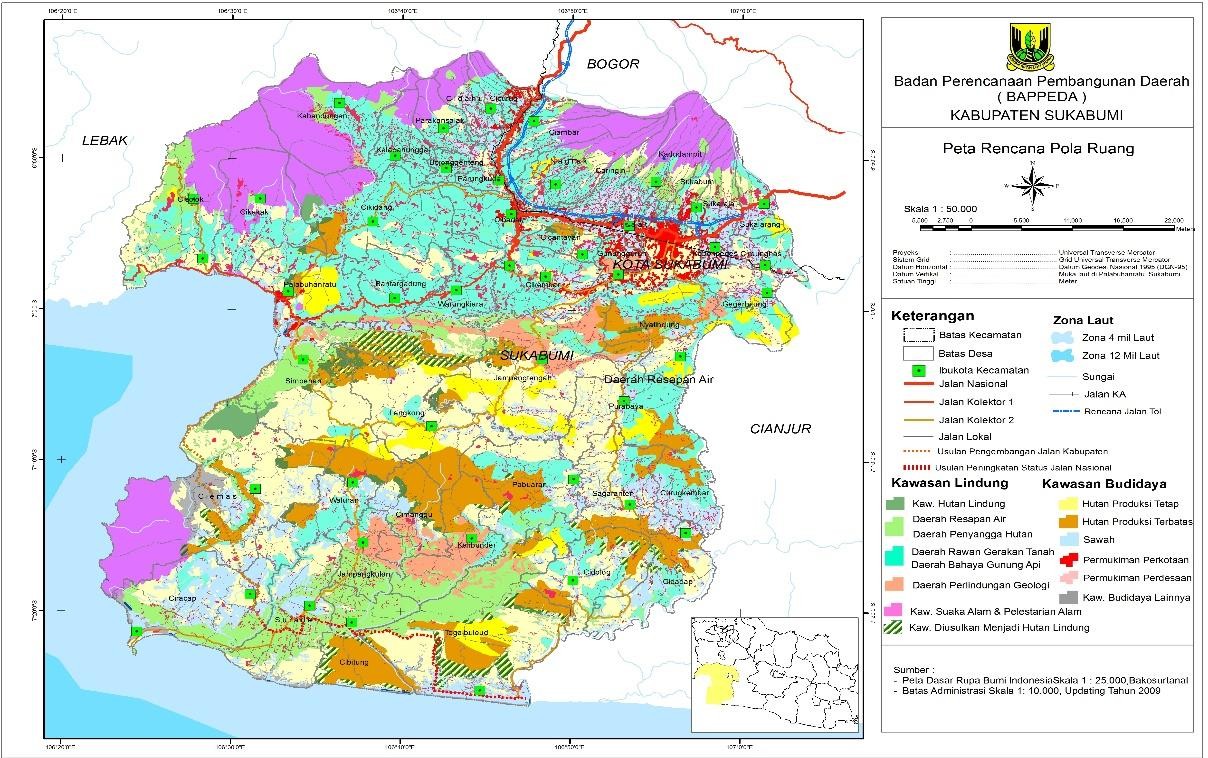
Kabupaten Sukabumi berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh 95 km dari Ibukota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 6o 57’ - 7o 25’ Lintang Selatan dan 106o49’ - 107o00’ Bujur Timur dan mempunyai luas daerah 4.162 km2 atau 11,21 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa, dengan batas-batas wilayahnya :

* + - Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor,
    - Sebelah Selatan , berbatasan dengan Samudera Indonesia,
    - Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia, serta
    - Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong (*enclave*) dikelilingi beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sukabumi di sebelah Utara, Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Gunung Guruh di sebelah Barat, Kecamatan Nyalindung di sebelah Selatan, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Kebonpedes di sebelah Timur.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2014-2034, rencana pemanfaatan kawasan lindung diarahkan berdasarkan klasifikasi kawasan lindung nasional, yang terdiri atas : 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

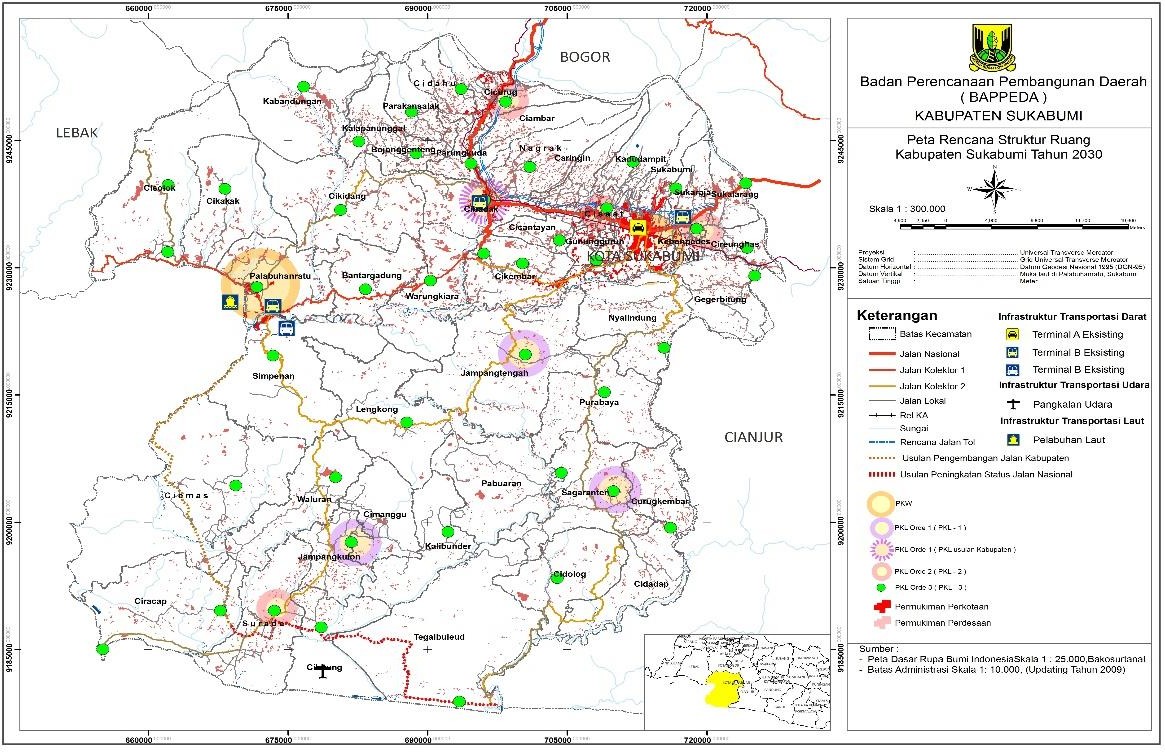
2) kawasan perlindungan setempat; 3) kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; 4) kawasan rawan bencana alam; 5) kawasan lindung geologi; dan 6) kawasan lindung lainnya. Rencana pola ruang Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :



# Gambar 3.1

**Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sukabumi**

Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi membagi sistem pusat kegiatan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dapat terlihat dalam Gambar 3.2 dibawah ini.



# Gambar 3.2

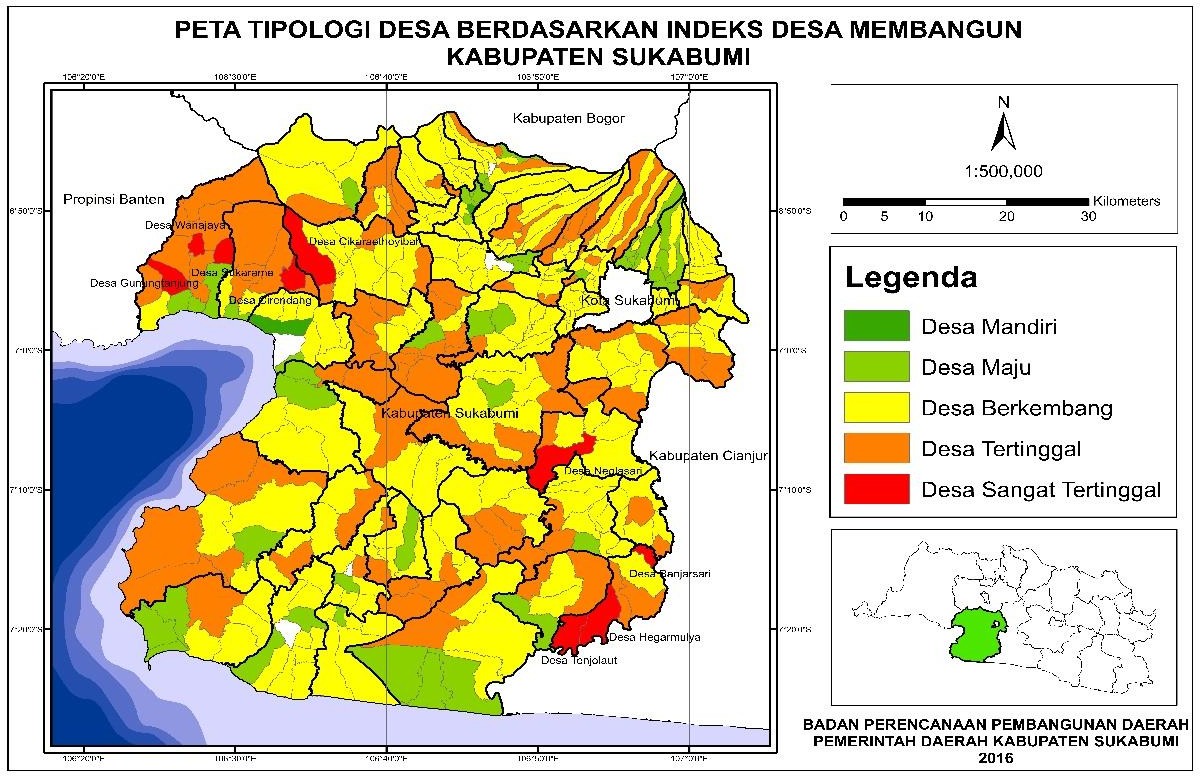
**Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi**

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali yang secara administratif memiliki 47 kecamatan,

381 desa dan 5 Kelurahan. Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi tersebut memerlukan penanganan serius terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa-desa yang masih masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal, sebagaimana dalam penetapan tipologi status kemajuan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Seiring dengan perkembangannya di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 pasal 9 serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, tingkatan kemajuan desa didasarkan beberapa kriteria yaitu Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, Desa berkembang, Desa maju dan/atau mandiri.

Saat ini di Kabupaten sukabumi terdapat 9 desa sangat tertinggal (2,4 %), 102 desa tertinggal (12,3%), 221 desa berkembang

(58,0%), 47 desa maju (26, 8%) dan 2 desa mandiri ( 0,5 %). Hal ini dapat terlihat pada Gambar 3.3 berikut :

# Gambar 3.3

**Peta Tipologi Desa berdasarkan IDM Kabupaten Sukabumi**

Pendekatan strategi dalam rangka mencapai tujuan percepatan Pembangunan Desa berbasis Indeks Desa Membangun dilaksanakan melalui :

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. optimalisasi potensi wilayah desa sangat tertingal dan desa tertinggal;
3. pengembangan Infrastruktur desa sangat tertingal dan desa tertinggal;
4. peningkatan kemitraan dan kerjasama desa; dan
5. penguatan modal sosial dan lingkungan hidup.

# Penentuan Isu-Isu Strategis

Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tidak besentuhan langsung dengan kebijakan dan program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DPMD Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Masih adanya kategori Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertingal yang harus segera di tingkatkan.
2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa yang masih rendah.
4. Peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih belum optimal.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai.
6. Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Mikro Perdesaan masih belum optimal.

Adapun strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

# Strategi S-O (Strengths – Opportunities) :

1. Mengoptimalkan kewenangan untuk mendorong masyarakat dalam bergotong royong dan berswadaya.
2. Mengoptimalkan SDM aparat, kelembagaan masyarakat dan masyarakat yang di dukung dengan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
3. Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku.
4. Memanfaatkan panduan dan sistem mekanisme kerja untuk mendukung program-program bantuan dari pusat dan propinsi.

# Strategi W-O (Weakness – Opportunities) :

1. Membangun sistem informasi data yang akurat untuk mendukung program bantuan dari pusat dan propinsi.
2. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
3. Optimalisasi pemakaian anggaran dengan menggali potensi swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

# Strategi S-T (Strengths – Treats) :

1. SDM aparat yang berkomitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas, panduan dan sistem mekanisme kerja serta anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana desa, infrastruktur perdesaan serta mengurangi jumlah keluarga miskin.
2. Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa serta meningkatkan potensi desa.

# Strategi W-T (Weakness – Treats) :

1. Optimalisasi pemakaian anggaran dengan membangun sistem informasi data yang akurat serta di dukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, infrastruktur perdesaan serta pengurangan jumlah keluarga miskin.
2. Menambah tenaga fungsional untuk meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat serta masyarakat desa.

# BAB IV

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

* 1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa Rencana Program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan strategis perangkat daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan rencana strategis DPMD Kabupaten Sukabumi selama periode 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

* + 1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa;
    2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
    3. Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan;
    4. Membangun budaya partisipasi masyarakat.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DPMD Kabupaten Sukabumi yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa dan Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan.

Perumusan tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

# Tujuan Kesatu : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa

Upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik (*Good Village Governance*) memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Aparatur yang profesional pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni : **Pertama,** profesi yaitu aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; **Kedua,** pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas administrasi desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Aparatur Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penunjang pembangunan Desa memerlukan efisiensi dan efektivitas dalam setiap pelaksanaan tugasnya apalagi sekarang sudah ada regulasi baru yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aparatur Pemerintahan Desa memiliki beban tugas dan tanggung jawab mengelola keuangan desa yang cukup besar untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditunjang oleh kinerja aparatur pemerintahan desa yang professional. Guna meningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa yang efektif dan efisien, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Tersedianya Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional
2. Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik

# Tujuan Kedua : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) sebagai sebuah paradigma pembangunan memiliki posisi unik jika dilihat dari perspektif urusan, karena sesungguhnya pemberdayaan masyarakat adalah ‘ruh’ dari pembangunan itu sendiri. Dalam tataran implementasi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, ia taat pada azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat sedangkan sebagai sebuah tujuan maka kemandirian masyarakat adalah tujuannya.

Guna meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Menurunnya Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.
2. Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
3. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

# Tujuan Ketiga : Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan merupakan salah satu upaya mendasar dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Potensi sumberdaya di desa yang melimpah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk eksistensi kelembagaan ekonomi mikro perdesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa harus dibangun berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus, yaitu: (1) kekuatan kelembagaan dan modal usaha produksi kolektif masyarakat, (2) keterlibatan bermakna masyarakat dalam tata pemerintahan Desa, (3) penguasaan atas literasi keuangan usaha dan (4) pengembangan serta pengelolaan BUM Desa yang tepat dan handal. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi mikro perdesaan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Terwujudnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa
2. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa

# Tujuan Keempat : Membangun budaya partisipasi masyarakat

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai penduduk desa diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat

secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan fenomena permasalahan yang harus segera diselesaikan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di desa. Adapun sasaran yang harus dicapai dalam adalah terwujudnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan DPMD lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam **Tabel 4.1** dibawah ini

# Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi 2016-2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator Kinerja**  **Tujuan** | **Target** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Target Kinerja Sasaran Tahun** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa | Meningkatnya Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Desa | 54,68 % | * Meningkatkan Penyelenggara   Pemerintah Desa yang profesional   * Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Desa yang   baik | * Persentase Penyelenggara Pemerintah Desa yang   terlatih/mendapatkan sertifikat kelulusan   * Persentase administrasi desa yang terkelola dengan baik | 39,37  1,57 | 52,49  1,57 | 52,49  1,57 | 65,62  1,57 | 65,62  1,57 | 52,49  1,57 |
| 2 | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan  desa yang | 7,87% | * Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. * Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat. * Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan   Organisasi Masyarakat. | * Persentase Desa Tertinggal & Sangat Tertinggal yang statusnya meningkat * Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih/mendapatkan sertifikat * Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 2  26,24 | 2  26,24 | 2  26,24 | 2  26,24 | 2  26,24 | 1,81  26,24 |
|  |  | berkembang |  | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator**  **Kinerja Tujuan** | **Target** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Target Kinerja Sasaran Tahun** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 3 | Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Kemandirian Ekonomi Mikro Perdesaan | Meningkatnya Ekonomi Mikro pedesaan yang mandiri | 3,15% | * Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa * Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa | * Persentase BUMDesa yang berkembang * Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri | 1,31  0,52 | 2,62  0,52 | 2,62  0,52 | 2,62  0,52 | 2,62  0,52 | 2,62  1,81 |
| 4 | Membangun Budaya Partisipasi Masyarakat | Menigkatnya Partisipasi masyarakat dalam  pembangunan | 52,49 % | - Meningkatnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | - Persentase Kelompok Masyarakat yang  berpartisipasi dalam Pembangunan | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 | 52,49 |

* 1. **Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung capaian pembangunan. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan merata ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dalam sasaran. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran Renstra.

Rumusan penyataan strategi dan kebijakan DPMD Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.2 dibawah ini.

# Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Indikator Kinerja**  **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa | Meningkatnya Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Desa | * Meningkatnya Penyelenggara Pemerintah Desa yang profesional * Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik | Peningkatan Kinerja Pemerintah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 1. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa 2. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Administrasi Desa 3. Mengembangkan Teknologi Informasi Desa 4. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 5. Meningkatkan Penggalian dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa 6. Memfasilitasi Pemekaran Desa 7. Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa 8. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | terhadap kinerja Pemerintahan Desa. |
| Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Meningkatnya Lembaga  Kemasyarakatan | * Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. * Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat. * Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam  Pembangunan | 1. Memfasilitasi Bantuan Infrastruktur dan Suprastruktur Perdesaan. 2. Melaksanakan Updating Data Profil Desa secara rutin. 3. Melaksanakan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa. 4. Memfasilitasi Pengadaan Sarana Prasarana Perdesaan. 5. Meningkatkan Akses Transportasi, Pendidikan, Kesehatan dan daya beli masyarakat. 6. Menurunkan Persentase Desa tertinggal. 7. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan   pembangunan. |
|  | desa yang |  |
|  | berkembang |  |
| Meningkatkan | - Meningkatnya Ekonomi Mikro pedesaan yang mandiri | * Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa * meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa | Pengembangan | 1. Meningkatkan peran serta masyarakat perdesaan dalam mengisi   pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.   1. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan lembaga ekonomi masyarakat desa. 2. Memfasilitasi BUMDesa Bersama. 3. Memfasilitasi terjalinnya Kerasama Antar Desa. 4. Memfasilitasi tersusunnya regulasi yang menguatkan keberadaan dan eksistensi lembaga ekonomi di tingkat desa. 5. Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. 6. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap lembaga ekonomi masyarakat desa |
| Kapasitas | Ekonomi |
| Lembaga dan | Berbasis |
| Kemandirian | Potensi Lokal |
| Ekonomi Mikro | dan Lembaga |
| Perdesaan | Keuangan |
|  | Mikro |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Membangun Budaya Partisipasi Masyarakat | - Menigkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan | - Terwujudnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan | 1. Meningkatkan peran serta masyarakat perdesaan dalam mengisi   pembangunan desa melalui upaya partisipasi dan komitmen bersama.   1. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan lembaga kemasyarakatan dan lembaga   pemerintahan di tingkat desa dalam upaya efektifitas pelaksanaan pembangunan.   1. Memfasilitasi segala bentuk upaya   pemerintahan desa terhadap terselenggaranya gerakan gotong royong dalam membangun desa.   1. Melaksanakan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat. 2. Meningkatkan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap lembaga kemasyarakatan. |

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menyajikan isi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan sepanjang periode waktu 2016-2021, Daftar rencana indikasi rencana program dan kegiatan ini disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan batas kewenangan Bupati Sukabumi, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, sehingga tidak akan berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam jurisdiksi kewenangan Provinsi dan Pusat;
2. Sesuai dengan batas tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sehingga tidak akan berbenturan dengan program turunan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas dan atau SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
3. Disusun berdasarkan statistik kondisi masa kini, target kinerja yang terukur, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta rumusan kebijakan teknis yang mudah disinkronkan dengan daftar nomenklatur program dan kode rekening kegiatan sebagaimana diuraikan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.

Indikasi rencana program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati serta penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk

melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Strategis DPMD Kabupaten Sukabumi sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap bidang ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RENSTRA harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan DPMD Kabupaten Sukabumi, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka program pembangunan yang menjadi prioritas DPMD Kabupaten Sukabumi dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program prioritas dan beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RENSTRA DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 5.1** berikut ini.

# Tabel 5.1

**Daftar Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan**

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi 2016-2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **Indikator Kinerja** | **Penjela san** | **Satua n** | **Kondisi Kinerja Awal RPJMD**  **(Tahun 2015)** | **Target Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | **SKPD**  **Penanggu ng**  **jawab** |
| **Tahun 2016** | | **Tahun 2017** | | **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Kondisi Kinerja**  **Akhir Periode RPJMD** | |
| **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **DPMD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | % | 100% | 100% | 771 | 100% | 848 | 100% | 933 | 100% | 1,026 | 100% | 1,129 | 100% | 1,242 | 100% | 5,950 | DPMD |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  | % | 0% | 20% | 250 | 20% | 250 | 20% | 270 | 20% | 270 | 20% | 300 | 20% | 300 | 100% | 1,640 | DPMD |
| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | % | 100% | 100% | 650 | 100% | 1,000 | 100% | 1,050 | 100% | 1,150 | 100% | 1,200 | 100% | 1,300 | 100% | 6,350 | DPMD |
| 4 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Disiplin Aparatur |  | % | 100% | 100% | 69,5 | 100% | 69,5 | 100% | 69,5 | 100% | 69,5 | 100% | 69,5 | 100% | 69,5 | 100% | 417 | DPMD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **Indikator Kinerja** | **Penjela san** | **Satua n** | **Kondisi Kinerja Awal RPJMD**  **(Tahun 2015)** | **Target Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | **SKPD**  **Penanggu ng**  **jawab** |
| **Tahun 2016** | | **Tahun 2017** | | **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD** | |
| **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan |  | % | 100% | 100% | 113 | 100% | 124 | 100% | 137 | 100% | 150 | 100% | 165 | 100% | 182 | 100% | 871 | DPMD |
| 5 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | Persentase BUMDesa yang berkembang |  | % | 100% | 1,31% | 750 | 2,62% | 750 | 2,62% | 900 | 2,62% | 1,000 | 2,62% | 1,200 | 2,62% | 1,300 | 14,44% | 5,900 | DPMD |
|  |  | Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri |  | % |  | 0,52% | 650 | 0**,**52% | 1,950 | 0**,**52% | 1,450 | 0**,**52% | 1,450 | 0**,**52% | 1,650 | 0**,**52% | 1,700 | 3,15% | 8,850 | DPMD |
| 6 | Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan | Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan |  | % | 52,49% | 52,49% | 2500 | 52,49% | 2500 | 52,49% | 2900 | 52,49% | 3000 | 52,49% | 3300 | 52,49% | 3400 | 52,49% | 17600 | KECAMAT AN/ DPMD |
| 7 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih |  | % | 200% | 39,37% | 2,600 | 52,49% | 5,200 | 52,49% | 1,350 | 65,62% | 7,500 | 65,62% | 1,650 | 52,49% | 4,300 | 54,68% | 22,600 | DPMD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **Indikator Kinerja** | **Penjela san** | **Satua n** | **Kondisi Kinerja Awal RPJMD**  **(Tahun 2015)** | **Target Kinerja** | | | | | | | | | | | | | | **SKPD**  **Penanggu ng**  **jawab** |
| **Tahun 2016** | | **Tahun 2017** | | **Tahun 2018** | | **Tahun 2019** | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD** | |
| **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** | **Target** | **Rp (juta)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  | Persentase Administrasi Desa yang terkelola dengan baik |  | % | 6,56% | 1,31% | 850 | 1,31% | 1,750 | 1,31% | 2,150 | 1,31% | 1,900 | 1,31% | 3,100 | 1,31% | 2,600 | 7,87% | 12,350 | DPMD |
| 8 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih |  | % |  | 26,25% | 300 | 26,25% | 1,000 | 26,25% | 1,000 | 26,25% | 1,200 | 26,25% | 1,200 | 26,25% | 1,400 | 26,25% | 6,100 | DPMD |
|  |  | Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal |  | Desa | 111 | 2 | 1,800 | 2 | 2,200 | 2 | 2,400 | 2 | 2,700 | 2 | 2,800 | 2 | 3,200 | 12 | 15,100 | DPMD |
|  |  | Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa |  | % | 3,67% | 1,31% | 400 | 1,31% | 1,150 | 1,31% | 1,300 | 1,31% | 1,450 | 1,31% | 1,600 | 1,31% | 1,700 | 7,87% | 7,600 | DPMD |

Dalam rangka memudahkan untuk pencapaian kinerja dari setiap indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan yang disajikan di atas, maka DPMD Kabupaten Sukabumi menurunkan kedalam berbagai kegiatan pendukung program prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan target kinerja setiap tahun sebagai Rencana Kerja Tahunan DPMD Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dapat dilihat pada **Tabel 5.2.**

***Rencana Strategis DPMD Kab.Sukabumi 2016-2021*** V-6

**Tabel 5.2**

**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal  Perencanaa n | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggu ngjawab | Lokas i |
| Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Kondisi kinerja akhir Renstra PD | |
| target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| **Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi** | **Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi** | **Meningkanya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi** | **Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD** |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **90%** | **100%** | **771,000** | **100%** | **848,000** | **100%** | **933,000** | **100%** | **1,026,000** | **100%** | **1,129,000** | **100%** | **1,242,000** | **100%** | **5,949,000** | **DPMD** |  |
|  |  |  |  |  | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 90% | 100% | 771,000 | 100% | 848,000 | 100% | 933,000 | 100% | 1,026,000 | 100% | 1,129,000 | 100% | 1,242,000 | 100% | 5,949,000 | DPMD |  |
| **Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi** | **Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi** | **Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi** | **Tingkat Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100%** | **100%** | **250,000** | **100%** | **250,000** | **100%** | **270,000** | **100%** | **270,000** | **100%** | **300,000** | **100%** | **300,000** | **100%** | **1,640,000** | **DPMD** |  |
|  |  |  |  |  | Pengembangan Kapasitas Pegawai | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 33 orang | 33 orang | 250,000 | 33 orang | 250,000 | 35 orang | 270,000 | 35 orang | 270,000 | 37 orang | 300,000 | 37 orang | 300,000 | 37 orang | 1,640,000 | DPMD |  |
| **Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi** | **Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi** | **Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi** | **Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja** |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Prosentase tersedianya sarana prasarana aparatur** | **100%** | **100%** | **705,000** | **100%** | **1,060,000** | **100%** | **1,110,000** | **100%** | **1,210,000** | **100%** | **1,260,000** | **100%** | **1,360,000** | **100%** | **6,705,000** | **DPMD** |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Meubeler | Jumlah Meubeler Kantor | 1 pkt | 1 pkt | 100,000 | 1 pkt | 200,000 | 1 pkt | 200,000 | 1 pkt | 200,000 | 1 pkt | 200,000 | 1 pkt | 200,000 | 5 pkt | 1,100,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 pkt | 1 pkt | 150,000 | 1 pkt | 200,000 | 1 pkt | 200,000 | 1 pkt | 200,000 | 1 pkt | 200,000 | 1 pkt | 200,000 | 5 pkt | 1,150,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Perangkat komputer | Jumlah Perangkat komputer |  | 4 Unit | 55,000 | 1 pkt | 60,000 | 1 pkt | 60,000 | 1 pkt | 60,000 | 1 pkt | 60,000 | 1 pkt | 60,000 | 5 pkt | 355,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala AC | Jumlah AC yang terpelihara | 26 unit | 26 unit | 50,000 | 26 unit | 100,000 | 26 unit | 100,000 | 26 unit | 150,000 | 26 unit | 150,000 | 26 unit | 200,000 | 26 unit | 750,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan  Dinas//Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang  terpelihara | 8 unit | 8 unit | 350,000 | 8 unit | 400,000 | 8 unit | 450,000 | 8 unit | 450,000 | 9 unit | 500,000 | 9 unit | 550,000 | 9 unit | 2,700,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah Gedung yang direhab/dipelihara | 1 gedung | - | - | 1 gedung | 100,000 | 1 gedung | 100,000 | 1 gedung | 150,000 | 1 gedung | 150,000 | 1 gedung | 150,000 | 1 gedung | 650,000 | DPMD |  |
| **Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi** | **Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi** | **Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi** | **Tingkat Disiplin Aparatur** |  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Prosentase Sumber Daya Aparatur yang disiplin** | **100%** | **100%** | **69,500** | **100%** | **69,500** | **100%** | **69,500** | **100%** | **69,500** | **100%** | **69,500** | **100%** | **69,500** | **100%** | **417,000** | **DPMD** |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta  Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang  tersedia | 45 pkt | 45 pkt | 20,000 | 45 pkt | 20,000 | 45 pkt | 20,000 | 45 pkt | 20,000 | 45 pkt | 20,000 | 45 pkt | 20,000 | 45 pkt | 120,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu yang tersedia | 45 pkt | 45 pkt | 49,500 | 45 pkt | 49,500 | 45 pkt | 49,500 | 45 pkt | 49,500 | 45 pkt | 49,500 | 45 pkt | 49,500 | 45 pkt | 297,000 | DPMD |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal  Perencanaa n | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggu ngjawab | Lokas i |
| Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Kondisi kinerja akhir Renstra PD | |
| target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| **Meningkatnya Kinerja DPMD Kab. Sukabumi** | **Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi** | **Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi** | **Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja** |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Prosentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja** | **100%** | **100%** | **113,000** | **100%** | **124,000** | **2 dok** | **237,000** | **100%** | **250,000** | **100%** | **265,000** | **100%** | **282,000** | **100%** | **1,271,000** | **DPMD** |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan  Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian  Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 1 dok | 1 dok | 98,000 | 1 dok | 109,000 | 1 dok | 122,000 | 1 dok | 135,000 | 1 dok | 150,000 | 1 dok | 167,000 | 1 dok | 781,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Kebijakan | Jumlah Dokumen Capaian  Kinerja dan Ikhtisar Realisasi |  |  |  |  |  | 3 dok | 100,000 | 3 dok | 100,000 | 3 dok | 100,000 | 4 dok | 100,000 | 3 dok | 100,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah Dokumen Laporan  Keuangan | 1 dok | 1 dok | 15,000 | 1 dok | 15,000 | 1 dok | 15,000 | 1 dok | 15,000 | 1 dok | 15,000 | 1 dok | 15,000 | 1 dok | 90,000 | DPMD |  |
| **Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa** | **Kompetensi penyelenggara pemerintah Desa** | **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang profesional** | **Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih** |  | **Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa** | **Persentase Penyelenggara Pemerintah Desa yang terlatih** | **200** | **39.37** | **3,050,000** | **52.49** | **4,000,000** | **52.49** | **3,800,000** | **65.62** | **4,800,000** | **65.62** | **4,200,000** | **52.49** | **4,650,000** | **54.68** | **24,500,000** | **DPMD** |  |
|  |  | **Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa yang baik** | **Pengelolaan Administrasi Desa yang tertib dan teratur** |  |  | **Persentase Administrasi Desa yang terkelola dengan baik** | **6.56** | **1.31** | **1,050,000** | **1.31** | **3,400,000** | **1.31** | **3,850,000** | **1.31** | **3,650,000** | **1.31** | **5,250,000** | **1.31** | **4,800,000** | **7.87** | **22,000,000** | **DPMD** |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa | Jumlah aparatur Pemdes yg di Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa | 381 orang | 100 orang | 200,000 | 200 orang | 400,000 | 200 orang | 450,000 | 200 orang | 500,000 | 200 orang | 550,000 | 200 orang | 600,000 | 1.100  orang | 2,700,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan  desa | Jumlah aparatur Pemdes yg di Bimtek manajemen Pemdes | - | 100 orang | 200,000 | 200 orang | 400,000 | 200 orang | 450,000 | 200 orang | 500,000 | 200 orang | 550,000 | 200 orang | 600,000 | 1.100  orang | 2,700,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis Administrasi Desa | Jumlah aparatur Pemdes yg di Bimtek Administrasi Desa | - | 100 orang | 200,000 | 200 orang | 400,000 | 200 orang | 450,000 | 200 orang | 500,000 | 200 orang | 550,000 | 200 orang | 600,000 | 1.100  orang | 2,700,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis Kepala Desa Pemula dan Ladies Program | Jumlah Kepala Desa dan Istri Kepala Desa yang di Bimtek | - | 140 orang | 250,000 | 200 orang | 400,000 | - | - | 422 orang | 800,000 | - | - | 140 orang | 250,000 | 762 orang | 1,700,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis BPD | Jumlah Anggota BPD yang di  Bimtek | - | 100 orang | 200,000 | 200 orang | 400,000 | 200 orang | 450,000 | 200 orang | 500,000 | 200 orang | 550,000 | 200 orang | 600,000 | 1.100  orang | 2,700,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah aparatur Pemdes yg di bina dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 381 orang | 100 orang | 200,000 | 200 orang | 400,000 | 200 orang | 450,000 | 200 orang | 500,000 | 200 orang | 550,000 | 200 orang | 600,000 | 1.100  orang | 2,700,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Profil Desa | Jumlah data Profil Desa yang  up to date | 381 Desa | 47 Desa | 300,000 | 381 Desa | 500,000 | 381 Desa | 600,000 | 381 Desa | 700,000 | 381 Desa | 800,000 | 381 Desa | 900,000 | 381 Desa | 3,800,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penegasan Batas Desa | Jumlah Batas Desa yang  Teridentifikasi | 10 Desa | - | - | 5 Desa | 250,000 | 5 Desa | 250,000 | 5 Desa | 250,000 | 5 Desa | 250,000 | 5 Desa | 250,000 | 25 Desa | 1,250,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Rancangan Peraturan Bupati yang tersusun | 5 perbup | 1 perbup | 50,000 | 1 perbup | 50,000 | 1 perbup | 50,000 | 1 perbup | 100,000 | 1 perbup | 100,000 | 1 perbup | 100,000 | 6 perbup | 450,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Desa | Jumlah desa yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan desa | 381 Desa | 381 Desa | 200,000 | 381 Desa | 250,000 | 381 Desa | 300,000 | 381 Desa | 350,000 | 381 Desa | 400,000 | 381 Desa | 450,000 | 381 Desa | 1,950,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Sarana Prasarana Entri Data Profil Desa/Kel | Jumlah desa yang menyediakan Sarana Prasarana Entri Data Profil  Desa/Kel | 30 desa | 5 desa | 50,000 | 5 desa | 60,000 | 5 desa | 70,000 | 5 desa | 80,000 | 5 desa | 90,000 | 5 desa | 100,000 | 30 desa | 450,000 | DPMD |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal  Perencanaa n | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggu ngjawab | Lokas i |
| Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Kondisi kinerja akhir Renstra PD | |
| target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  | Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang tertib dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa | - | - | - | 70 Desa | 300,000 | 100  Desa | 500,000 | - | - | 211  Desa | 1,000,000 | 70 Desa | 300,000 | 381  Desa | 2,100,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak | Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak  bergelombang | 381 Desa | 70 Desa | 6,000,000 | 100  Desa | 10,000,000 | - | - | 211 Desa | 20,000,000 | - | - | 70 Desa | 8,000,000 | 381  Desa | 44,000,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Lomba Desa | Jumlah Desa yang mengikuti Perlombaan Desa | 25 Desa | 5 Desa | 300,000 | 10 Desa | 400,000 | 10 Desa | 450,000 | 10 Desa | 500,000 | 10 Desa | 550,000 | 10 Desa | 600,000 | 60 Desa | 2,800,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) | Jumlah Desa yang tertib dalam penyusunan APB Desa | 381 Desa | - | - | 75 Desa | 150,000 | 75 Desa | 150,000 | 75 Desa | 150,000 | 78 Desa | 250,000 | 78 Desa | 250,000 | 381  Desa | 950,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pendataan Asset Desa | Tersedianya Data Asset Desa | 381 Desa | - | - | 75 Desa | 200,000 | 75 Desa | 200,000 | 75 Desa | 200,000 | 78 Desa | 250,000 | 78 Desa | 250,000 | 381  Desa | 1,100,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Dukungan Penatausahaan Keuangan dan Asset Desa | Jumlah Desa yang tertib dalam penatausahaan Keuangan dan Asset Desa | 381 Desa | - | - | 75 Desa | 200,000 | 75 Desa | 200,000 | 75 Desa | 200,000 | 78 Desa | 250,000 | 78 Desa | 250,000 | 381  Desa | 1,100,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa | Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi APB  Desa | 381 Desa | - | - | 75 Desa | 150,000 | 75 Desa | 150,000 | 75 Desa | 150,000 | 78 Desa | 250,000 | 78 Desa | 250,000 | 381  Desa | 950,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Dukungan Manajemen Bale Sawala  SISKEUDES | Jumlah Desa yang mengelola  SISKEUDES | 381 Desa | - | - | 381 Desa | 350,000 | 381 Desa | 350,000 | 381 Desa | 350,000 | 381 Desa | 350,000 | 381 Desa | 350,000 | 381  Desa | 1,750,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan dan aset desa | Jumlah perangkat desa yang dilatih | 47 kec |  |  | 47 kec | 90,000 | 47 kec | 100,000 | 47 kec | 100,000 | 47 kec | 120,000 | 47 kec | 120,000 | 47 kec | 530,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan teknis penatausahaan keuangan  dan aset desa | Jumlah perangkat desa yang  dilatih |  |  |  | 70 orang | 100,000 | 71 orang | 110,000 | 80 orang | 120,000 | 80 orang | 120,000 | 80 orang | 130,000 | 381 orang | 580,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan teknis perencanaan keuangan  dan aset desa | Jumlah perangkat desa yang  dilatih |  |  |  | 100 orang | 160,000 | 100 orang | 160,000 | 100 orang | 175,000 | 100 orang | 175,000 | 100 orang | 180,000 | 500 orang | 850,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pembinaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa | Jumlah Desa yang tertib dalam pertanggungjawaban Keuangan dan Asset Desa | 381 Desa | - | - | 75 Desa | 200,000 | 75 Desa | 200,000 | 75 Desa | 200,000 | 78 Desa | 250,000 | 78 Desa | 250,000 | 381  Desa | 1,100,000 | DPMD |  |
| **Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | **Lembaga kemasyarakatan desa** | **meningkatnya status desa** | **Tingkat Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal** |  | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | **Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat** | **111 desa** | **2 desa** | **1,800,000** | **2 desa** | **2,700,000** | **2 desa** | **2,900,000** | **2 desa** | **3,200,000** | **2 desa** | **3,300,000** | **2 desa** | **3,700,000** | **12 desa** | **17,600,000** | **DPMD** |  |
| **Meningkatnya Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat** | **Tingkat Keterampilan Tenaga Teknis dan Masyarakat** |  | **Persentase Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih** |  | **26.25** | **300,000** | **26.25** | **1,000,000** | **26.25** | **1,000,000** | **26.25** | **1,200,000** | **26.25** | **1,200,000** | **26.25** | **1,400,000** | **26.25** | **6,100,000** | **DPMD** |  |
| **Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat** | **Cakupan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat** |  | **Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa** | **3.67** | **1.31** | **400,000** | **1.31** | **1,150,000** | **1.31** | **1,300,000** | **1.31** | **1,450,000** | **1.31** | **1,600,000** | **1.31** | **1,700,000** | **7.87** | **7,600,000** | **DPMD** |  |
|  |  |  |  |  | Pemberdayaan Desa-Desa Tertinggal | Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal yang statusnya meningkat | 111 Desa | 2 Desa | 1,000,000 | 2 Desa | 1,200,000 | 2 Desa | 1,400,000 | 2 Desa | 1,600,000 | 2 Desa | 1,700,000 | 2 Desa | 2,000,000 | 12 Desa | 8,900,000 | DPMD |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal  Perencanaa n | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggu ngjawab | Lokas i |
| Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Kondisi kinerja akhir Renstra PD | |
| target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tenaga Teknis dan Masyarakat | Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat yang terlatih | - | - | - | 100 orang | 200,000 | 100 orang | 200,000 | 100 orang | 250,000 | 100 orang | 250,000 | 100 orang | 300,000 | 500 orang | 1,200,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa | Jumlah Masyarakat yang ikut Diseminasi Informasi tentang  Desa | - | - | - | 200 orang | 400,000 | 200 orang | 400,000 | 200 orang | 450,000 | 200 orang | 450,000 | 200 orang | 500,000 | 1.000  orang | 2,200,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Efektivitas Penyaluran Dana  Desa | Jumlah Desa yang menerima  Dana Desa | 381 Desa | 381 Desa | 800,000 | 381 Desa | 1,000,000 | 381 Desa | 1,000,000 | 381 Desa | 1,100,000 | 381 Desa | 1,100,000 | 381 Desa | 1,200,000 | 381 Desa | 6,200,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Sarana Prasarana Desa | Jumlah Sarana Prasarana Desa yang tersedia | - | 10 Unit | 200,000 | 10 Unit | 200,000 | 10 Unit | 200,000 | 10 Unit | 250,000 | 10 Unit | 250,000 | 10 Unit | 300,000 | 50 Unit | 1,400,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Keberdayaan Desa-Desa Perbatasan | Jumlah Desa-Desa yang meningkat Infrastrukturnya | - | 1 Desa | 100,000 | 2 Desa | 200,000 | 2 Desa | 200,000 | 2 Desa | 250,000 | 2 Desa | 250,000 | 2 Desa | 300,000 | 10 Desa | 1,300,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Rancangan Perbup Dana Desa dan alokasi dana desa | Jumlah Revisi Perda Tentang Desa |  |  |  | 1 perda | 50,000 | 1 perda | 50,000 | 1 perda | 60,000 | 1 perda | 60,000 | 1 perda | 60,000 | 5 perda | 280,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan teknis Administrasi desa | Jumlah perangkat desa yang  dilatih |  |  |  | 75 orang | 100,000 | 75 orang | 100,000 | 75 orang | 120,000 | 75 orang | 120,000 | 75 orang | 130,000 | 375 orang | 570,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Dukungan Manajemen partisipatif | Jumlah peserta workshop pemberdayaan masyarakat |  |  |  | 141 orang | 150,000 | 150 orang | 160,000 | 100 orang | 160,000 | 100 orang | 160,000 | 100 orang | 160,000 | 591 orang | 790,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Dukungan Manajemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMSS | Jumlah Kecamatan yg terfasilitasi koordinasinya antara TNI, Pemuda dan masyarakat |  |  |  | 3 Kec | 700,000 | 3 Kec | 700,000 | 3 Kec | 700,000 | 3 Kec | 700,000 | 3 Kec | 700,000 | 15 Kec | 3,500,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM) | Jumlah Kecamatan yg melaksanakan Penilaian, pencanangan BBGRM Kabupaten, Provinsi dan  Nasional |  |  |  | 47 Kec | 270,000 | 47 Kec | 300,000 | 47 Kec | 300,000 | 47 Kec | 300,000 | 47 Kec | 400,000 | 47 Kec | 1,570,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Pra Musrenbang Desa | Jumlah Desa yang mengikuti Desiminasi pramusrembang  Desa |  |  |  | 381 Desa | 315,000 | 381 Desa | 350,000 | 381 Desa | 350,000 | 381 Desa | 400,000 | 381 Desa | 400,000 | 381 Desa | 1,815,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Program Terpadu pemberdayaan Masyarakat/PAP PNPM GSC | Jumlah kegiatan Program terpadu Pemberdayaan masyarakat yg terlaksana |  |  |  | 11  Kegiatan | 200,000 | 11  Kegiatan | 250,000 | 11  Kegiatan | 250,000 | 11  Kegiatan | 300,000 | 11  Kegiatan | 300,000 | 55  Kegiatan | 1,300,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pembangunan Gedung Baru Kantor DPMD Kabupaten Sukabumi | Jumlah Gedung Baru DPMD Kab. Sukabumi yg terbangun | 1 gedung | - | - | 1 gedung | 4,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 gedung | 4,000,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pembangunan/ Rehab Kantor Desa | Jumlah Kantor Desa yang  terbangun | 30 Desa | 2 Desa | 200,000 | 2 Desa | 200,000 | 2 Desa | 200,000 | 2 Desa | 250,000 | 2 Desa | 250,000 | 2 Desa | 300,000 | 2 Desa | 1,400,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Sinergitas Peran Pelaku Lembaga Masyarakat | Cakupan Sinergitas antara Peran Pelaku Lembaga Masyarakat Desa | - | - | - | 50 Desa | 100,000 | 50 Desa | 150,000 | 50 Desa | 200,000 | 50 Desa | 250,000 | 50 Desa | 300,000 | 50 Desa | 1,000,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa | Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang berdaya | - | - | - | 10 klpk | 500,000 | 10 klpk | 500,000 | 10 klpk | 500,000 | 10 klpk | 500,000 | 10 klpk | 500,000 | 10 klpk | 2,500,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penguatan Pokjanal Posyandu | Jumlah Peningkatan Kapasitas Posyandu desa | - | 47  Posyandu | 400,000 | 47  Posyandu | 400,000 | 47  Posyandu | 450,000 | 47  Posyandu | 500,000 | 47  Posyandu | 550,000 | 47  Posyandu | 600,000 | 47  Posyandu | 2,900,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pengembangan Pelayanan Sosial Dasar | Jumlah Desa yang meningkat Pelayanan Sosial Dasarnya | - | - | - | 5 Desa | 500,000 | 5 Desa | 500,000 | 5 Desa | 500,000 | 5 Desa | 500,000 | 5 Desa | 500,000 | 25 Desa | 2,500,000 | DPMD |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal  Perencanaa n | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggu ngjawab | Lokas i |
| Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Kondisi kinerja akhir Renstra PD | |
| target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  | Penguatan Kelembagaan Masyarakat | Jumlah Kelembagaan  Masyarakat yg menguat | - | - | - | 3 klpk | 150,000 | 3 klpk | 200,000 | 3 klpk | 250,000 | 3 klpk | 300,000 | 3 klpk | 300,000 | 3 klpk | 1,200,000 | DPMD |  |
| **Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan** | Kemandirian Ekonomi Mikro pedesaan | **Meningkatnya Manajemen Pengelolaan BUMDesa** | **Tingkat Pengelolaan Manajemen BUMDesa** |  | **Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan** | **Persentase BUMDesa yang berkembang** | **100** | **1.31** | **850,000** | **2.62** | **1,150,000** | **2.62** | **1,200,000** | **2.62** | **1,300,000** | **2.62** | **1,500,000** | **2.62** | **1,600,000** | **14.44** | **7,600,000** | **DPMD** |  |
|  | **Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa** | **Cakupan Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Desa** |  | **Persentase Usaha Ekonomi Desa yang mandiri** |  | **0.52** | **550,000** | **0.52** | **2,150,000** | **0.52** | **1,750,000** | **0.52** | **1,750,000** | **0.52** | **1,950,000** | **0.52** | **2,000,000** | **3.15** | **10,150,000** | **DPMD** |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis usaha budidaya tanaman | Jumlah Kelompok yang dilatih Budidaya tanaman | - | - | - | 10 Klpk | 200,000 | 5 Klpk | 100,000 | 5 Klpk | 100,000 | 5 Klpk | 100,000 | 5 Klpk | 100,000 | 30 Klpk | 600,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis Manajemen Badan  Usaha Milik Desa | Jumlah BUMDesa yang dilatih | - | 100 orang | 250,000 | 100 orang | 250,000 | 100 orang | 300,000 | 100 orang | 300,000 | 150 orang | 400,000 | 150 orang | 400,000 | 700 orang | 1,900,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis Usaha Industri Kerajinan | Jumlah Kelompok yang dilatih  Industri Kerajinan | - | - | - | 10 Klpk | 200,000 | 5 Klpk | 100,000 | 5 Klpk | 100,000 | 5 Klpk | 100,000 | 5 Klpk | 100,000 | 30 Klpk | 600,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis Usaha Pertanian dan  Perternakan | Jumlah Kelompok yang dilatih | - | - | - | 10 Klpk | 200,000 | 5 Klpk | 100,000 | 5 Klpk | 100,000 | 5 Klpk | 100,000 | 5 Klpk | 100,000 | 30 Klpk | 600,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Peningkatan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan | Jumlah Kelompok yang diberikan stimulan modal | - | - | - | 5 Klpk | 200,000 | 2 Klpk | 50,000 | 2 Klpk | 50,000 | 2 Klpk | 50,000 | 2 Klpk | 50,000 | 13 Klpk | 400,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penigkatan kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan | Jumlah Kelompok yang bermitra | - | - | - | 1 Klpk | 100,000 | 1 Klpk | 100,000 | 1 Klpk | 100,000 | 1 Klpk | 100,000 | 1 Klpk | 100,000 | 5 Klpk | 500,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Teknis perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif | Jumlah peserta yang dilatih usaha ekonomi produktif | - | - | - | 50 orang | 100,000 | 50 orang | 100,000 | 50 orang | 100,000 | 100 orang | 200,000 | 100 orang | 200,000 | 350 orang | 700,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pemanfaatan Potensi Lokal Desa | Jumlah Kelompok yang dibina | - | - | - | 3 Klpk | 100,000 | 1 Klpk | 50,000 | 1 Klpk | 50,000 | 1 Klpk | 50,000 | 1 Klpk | 50,000 | 7 Klpk | 300,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pembentukan Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) | Jumlah Pembentukan Kelembagaan POSYANTEK di TK Kecamatan | 5 Kec | 1 Kec | 100,000 | 1 Kec | 100,000 | 1 Kec | 150,000 | 1 Kec | 150,000 | 1 Kec | 200,000 | 1 Kec | 200,000 | 6 Kec | 900,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pemanfaatan dan Gelar Teknologi Tepat  Guna (TTG) | Jumlah Desa yang mengikuti  Gelar TTG | 15 Klpk | 5 Klpk | 450,000 | 5 Klpk | 450,000 | 5 Klpk | 500,000 | 5 Klpk | 500,000 | 5 Klpk | 550,000 | 5 Klpk | 600,000 | 30 Klpk | 3,050,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penguatan Perekonomian Mikro Pedesaan | Jumlah Desa yang dibina perekonomian mikronya | 381 Desa | 100  Desa | 500,000 | 100  Desa | 500,000 | 100  Desa | 600,000 | 100  Desa | 700,000 | 100  Desa | 800,000 | 100  Desa | 900,000 | 381  Desa | 4,000,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pengembangan Pasar Desa | Jumlah Pasar Desa yang  berkembang | 23 Desa | 1 Desa | 100,000 | 3 Desa | 300,000 | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 100,000 | 8 Desa | 800,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan | Jumlah Desa yang mendapat bantuan Sarana Prasarana Perdagangan | - | - | - | - | - | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 100,000 | 4 Desa | 400,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pengembangan Kawasan Perdesaan | Jumlah Kawasan Perdesaan yang berkembang | - | - | - | 1  Kawasan | 500,000 | 1  Kawasan | 500,000 | 1  Kawasan | 500,000 | 1  Kawasan | 500,000 | 1  Kawasan | 500,000 | 5  Kawasan | 2,500,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Dukungan Manajemen Kerjasama Antar Desa | Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama | - | - | - | 5 Desa | 100,000 | 5 Desa | 100,000 | 5 Desa | 100,000 | 5 Desa | 100,000 | 5 Desa | 100,000 | 25 Desa | 500,000 | DPMD |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal  Perencanaa n | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggu ngjawab | Lokas i |
| Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Kondisi kinerja akhir Renstra PD | |
| target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) | target | Rp. (000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| **Membangun budaya partisipasi masyarakat** | Partisipasi masyarakat | **Meningkatnya budaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan** | **Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan** |  | **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa** | **Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan** | **52.49** | **52.49** | **2,500,000** | **52.49** | **2,500,000** | **52.49** | **2,900,000** | **52.49** | **3,000,000** | **52.49** | **3,300,000** | **52.49** | **3,400,000** | **52.49** | **17,600,000** | **DPMD** |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Sosialisasi Pra Musrenbang Desa | Jumlah Desa yang Berpartisipasi dalam  Musrenbangdes | 381 desa | 381 desa | 500,000 | 381 desa | 500,000 | 381 desa | 550,000 | 381 desa | 550,000 | 381 desa | 600,000 | 381 desa | 600,000 | 381 desa | 3,300,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Pemberian stimulan pembangunan desa | Jumlah Desa yang  mendapatkan stimulan pembangunan desa | - | - | - | - | - | 1 desa | 100,000 | 1 desa | 100,000 | 1 desa | 100,000 | 1 desa | 100,000 | 4 desa | 400,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Provinsi | Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Provinsi | 381 Desa | 381 Desa | 250,000 | 381 Desa | 250,000 | 381 Desa | 300,000 | 381 Desa | 300,000 | 381 Desa | 350,000 | 381 Desa | 350,000 | 381 Desa | 1,800,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Dukungan Managemen TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan BSMSS | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong- royong Masyarakat dengan TNI | 10 desa | 2 Desa | 200,000 | 2 Desa | 200,000 | 2 Desa | 250,000 | 2 Desa | 250,000 | 2 Desa | 300,000 | 2 Desa | 300,000 | 10 Desa | 1,500,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui TMMD (Banprov) | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong- royong Masyarakat dengan TNI | 5 desa | 1 Desa | 150,000 | 1 Desa | 150,000 | 1 Desa | 150,000 | 1 Desa | 150,000 | 1 Desa | 150,000 | 1 Desa | 150,000 | 1 Desa | 900,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Peranserta Masyarakat melalui BSMSS (Banprov) | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Swadaya Gotong- royong Masyarakat dengan TNI | 5 desa | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 100,000 | 1 Desa | 600,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Gotong-royong | 5 desa | 100% | 300,000 | 100% | 300,000 | 100% | 350,000 | 100% | 350,000 | 100% | 400,000 | 100% | 400,000 | 100% | 2,100,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  | Dukungan Manajemen Partisipatif/ PNPM  GSc | Jumlah Desa yang terkelola | 47 Kec | 47 Kec | 1,000,000 | 47 Kec | 1,000,000 | 47 Kec | 1,100,000 | 47 Kec | 1,200,000 | 47 Kec | 1,300,000 | 47 Kec | 1,400,000 | 47 Kec | 7,000,000 | DPMD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Palabuhanratu, 2017

**Kepala Dinas,**



**ADE SETIAWAN,SIP**

Pembina Utama Muda,IV/c NIP. 19630603 198503 1 021

# BAB VI

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah dalam rangka memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah pada akhir periode kinerja yaitu tahun 2021, khususnya dalam mengukur keberhasilan capaian target kinerja selama 5 (lima) tahun. Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*out-comes*). Suatu indikator kinerja perangkat daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja perangkat daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja DPMD Kabupaten Sukabumi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMD Kabupaten Sukabumi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Indikator kinerja DPMD Kabupaten Sukabumi mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi ini sebagaimana tertuang dalam **Tabel 6.1** yaitu sebagai berikut :

***Rencana Strategis DPMD Kab.Sukabumi 2016-2021*** VI-1

# Tabel 6.1

**Indikator Kinerja DPMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **URUSAN / INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA** | **TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN** | | | | | | **KONDISI KINERJA PADA AKHIR**  **PERIODE RENSTRA** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **22** | **Urusan Pemberdayaan Masyarakat**  **dan Desa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Swadaya masyarakat terhadap  program pemberdayaan masyarakat | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 22.2 | Persentase aparatur desa yang mendapat pembinaan | % | 200  (75 orang) | 39,37  (150 orang) | 52,49  (200 orang) | 52,49  (200 orang) | 65,62  (250 orang) | 65,62  (250 orang) | 52,49  (200 orang) | 54,68  (1.250 orang) |
| 22.3 | Cakupan sarana dan prasarana perkantoran Pemerintahan Desa yang  baik | % | 1,31  (5 orang) | 1,31  (5 orang) | 1,31  (5 orang) | 1,31  (5 orang) | 1,31  (5 orang) | 1,31  (5 orang) | 1,31  (5 orang) | 7,87  (30 orang) |
| 22.4 | Persentase kelembagaan masyarakat  / organisasi masyarakat pedesaan | % | 3,67  (14 kelompok) | 1,31  (5 Kelompok) | 1,31  (5 Kelompok) | 1,31  (5 Kelompok) | 1,31  (5 Kelompok) | 1,31  (5 Kelompok) | 1,31  (5 Kelompok) | 7,87  (30 kelompok) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **URUSAN / INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA** | **TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN** | | | | | | **KONDISI KINERJA PADA AKHIR**  **PERIODE RENSTRA** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | yang dibina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  (LPM) yang berprestasi | Klpk | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 22.6 | Persentase Desa yang  administrasinya terkelola dengan baik | % | 6,56  (25 Desa) | 1,31  (5 Desa) | 1,31  (5 Desa) | 1,31  (5 Desa) | 1,31  (5 Desa) | 1,31  (5 Desa) | 1,31  (5 Desa) | 7,87  (30 Desa) |
| 22.7 | Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan  Tertinggal yang statusnya meningkat | Desa | 111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 22.8 | Persentase BUMDesa yang  berkembang | % | 100  (381 Desa) | 1,31  (5 Desa) | 2,62  (10 Desa) | 2,62  (10 Desa) | 2,62  (10 Desa) | 2,62  (10 Desa) | 2,62  (10 Desa) | 14,44  (55 desa) |
| 22.9 | Persentase Lembaga Usaha Ekonomi  Desa yang mandiri | % | 0,52  (2 kelompok) | 0,52  (2 kelompok) | 0,52  (2 kelompok) | 0,52  (2  kelompok) | 0,52  (2 kelompok) | 0,52  (2  kelompok) | 0,52  (2  kelompok) | 3,15  (12 kelompok) |
| 22.10 | Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam  pembangunan | % | 52,49  (200 kelompok) | 52,49  (200 kelompok) | 52,49  (200 kelompok) | 52,49  (200 kelompok) | 52,49  (200 kelompok) | 52,49  (200 kelompok) | 52,49  (200 kelompok) | 52,49  (1.200 kelompok) |

***Rencana Strategis DPMD Kab.Sukabumi 2016-2021*** VI-1

# BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Sukabumi serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016- 2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD Kabupaten Sukabumi yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra DPMD Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai DPMD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sukabumi yang ingin dicapai.

# BUPATI SUKABUMI,

**Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.**

***Rencana Strategis DPMD Kab.Sukabumi 2016-2021*** VII-1